

SKRIPSI
PENGARUH *BUDGET EMPHASIS* DAN *INFORMATION ASYMETRY*
TERHADAP *BUDGETARY SLACK* PADA
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN MAJENE

(THE EFFECT OF BUDGET EMPHASIS AND INFORMATION ASYMETRY
ON BUDGETARY SLACK IN REGIONAL APPARATUS
ORGANIZATIONS MAJENE REGENCY)



DEWI SHINTYA MAHARANI

C0217026

PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SULAWESI BARAT
MAJENE
2023

ABSTRAK

DEWI SHINTYA MAHARANI. 2023. Judul Skripsi **Pengaruh *Budget Emphasis* dan *Information Asymetry* Terhadap *Budgetary Slack* Pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majene.** Dibimbing oleh Sitti Hadijah, S.Pd., M.Ak selaku pembimbing I dan Taufik Hidayat B. Tahawa, SE., M.Ak selaku pembimbing II.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh *budget emphasis* dan *Information asymetry* terhadap *budgetary slack* pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majene. Jenis data yang digunakan adalah data kuantitatif dan sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan kuantitatif. Data penelitian diperoleh dari kuesioner yang diisi oleh pegawai Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majene. Teknik *sampling* yang digunakan adalah *non probability sampling* dengan Teknik *purposive sampling* dengan 83 responden. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) *budget emphasis* berpengaruh signifikan terhadap *budgetary slack* dengan t_{hitung} sebesar $7,170 > t_{tabel}$ $1,6642$ dengan signifikansi $0,000 < 0,05$. (2) *Information asymetry* berpengaruh signifikan terhadap *budgetary slack* dengan t_{hitung} sebesar $4,205 > t_{tabel}$ $1,6642$ dengan signifikansi $0,000 < 0,05$. (3) *budget emphasis* dan *Information asymetry* berpengaruh secara simultan terhadap *budgetary slack* dengan f_{hitung} sebesar $37,342 > f_{tabel}$ $3,11$ dengan signifikansi $0,000 < 0,05$. (4) nilai koefisien determinasi (R^2) adalah $0,483$ yang menerangkan perubahan variabel dependen sebesar $48,3\%$ sedangkan sisanya sebesar $51,7$ diterangkan oleh faktor lain diluar model regresi yang telah dianalisis.

Kata Kunci: *Budget Emphasis, Information Asymetry* dan *Budgetary Slack*.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Fase perencanaan sangat penting untuk semua jenis organisasi, termasuk entitas laba dan nirlaba. Kepatuhan yang ketat pada setiap fase proses perencanaan akan meningkatkan pelaksanaan kegiatan organisasi perencanaan strategis menumbuhkan pola pikir proaktif dan menggambarkan arah upaya masa depan. Perencanaan strategis merupakan upaya mengoperasionalkan pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan melalui perumusan strategi (mencakup programan kebijakan menyeluruh).

Melalui anggaran yang berfungsi sebagai mekanisme kontrol, dapat mencegah *overspending*, *underspending* dan *misappropriation* dalam alokasi dana pada bidang-bidang non prioritas. Pengawasan kondisi keuangan dan operasional pelaksanaan program atau kegiatan pemerintah merupakan fungsi dari anggaran. Anggaran sektor publik berfungsi sebagai mekanisme kontrol manajerial yang menjamin pemerintah memiliki sumber daya keuangan yang memadai untuk memenuhi tanggungjawabnya.

Anggaran sebagai rancangan yang dicatat berupa aktivitas organisasi secara kuantitatif dan dilakukan pada satuan moneter selama periode waktu tertentu. Secara keseluruhan dalam anggaran hubungan interpersonal punya andil yang penting. Anggaran mempengaruhi berbagai perilaku, termasuk tindakan positif dan negatif. Perilaku negatif dapat menyebabkan manajer mengembangkan kecenderungan untuk menciptakan *budgetary slack*.

Budgetary slack merupakan ketidaksesuaian antara sejumlah anggaran yang disarankan oleh bawahan dengan jumlah perkiraan yang baik dalam organisasi. Bawahan terkadang menciptakan *budgetary slack* dengan meninggikan pengeluaran dan menurunkan pendapatan dibandingkan perkiraan paling akurat yang diberikan, dengan tujuan menyederhanakan pencapaian tujuan. Menurut pendapat peneliti lain bahwa gejala *budgetary slack* tidak dapat dievaluasi secara kuantitatif sebelum anggaran dilaksanakan. Biasanya *budgetary slack* muncul ketika perolehan pendapatan melampaui tujuan yang telah ditentukan, sementara pemenuan pengeluaran tidak mencapai jumlah yang dianggarkan.

Budgetary Slack berpotensi memberikan dampak buruk pada entitas sektor publik, khususnya dengan mengakibatkan alokasi sumber daya yang tidak optimal. Selain itu alokasi yang suboptimal dapat menurunkan efisiensi organisasi. *Budgetary slack* sering terlihat dalam proses perencanaan dan penyusunan anggaran daerah, karena pekerjaan ini sering dilakukan untuk menguntungkan atasan dan bawahan. Perilaku positif dapat berupa peningkatan kinerja bawahan sedangkan perilaku negatif dapat berupa kecenderungan bawahan untuk menimbulkan *budgetary slack*. Terdapat beberapa sebab yang diyakini mempunyai pengaruh terhadap *budgetary slack* yaitu *budget emphasis* dan *information asymmetry*.

Budget emphasis merupakan salah satu faktor yang berkontribusi terhadap terjadinya *budgetary slack*. *Budget emphasis* mengacu pada tekanan yang diberikan oleh atasan kepada bawahan untuk secara efektif melaksanakan anggaran yang telah direncanakan dengan cermat. Tekanan tersebut berupa sanksi

jika anggaran tidak terpenuhi dan imbalan jika anggaran melampaui ketentuan yang disepakati. Keadaan tersebut dapat membuat bawahan cenderung tidak membatasi anggaran dalam upaya menyederhanakan pencapaian anggaran.

Faktor tambahan yang menjadi sebab terjadinya *budgetary slack* merupakan *information asymetry*. *Information asymetry* muncul ketika seorang bawahan memiliki pengetahuan yang lebih tinggi dibandingkan atasannya dan lebih mengetahui kebutuhan organisasi. Akibatnya, bawahan dapat menyajikan informasi yang bias dengan menyampaikan laporan anggaran yang tidak mencapai kinerja sesuai yang ditargetkan dan menetapkan target anggaran yang mudah dicapai, sehingga menyebabkan *budgetary slack*.

Information Asymetry merupakan perbedaan antara informasi yang dimiliki oleh atasan dan bawahan sebagai akibat dari perbedaan akses dan sumber data terkait. Peluang mungkin timbul bagi agen (bawahan) untuk menyumbangkan informasi lokal selama persiapan anggaran, sehingga memungkinkan bawahan untuk menyampaikannya dan mengungkap berbagai rincian pribadi yang dapat dimasukkan ke dalam anggaran. Selain itu, bawahan mempunyai kemampuan untuk menyembunyikan berbagai detail pribadi sehingga menimbulkan *budgetary slack*.

Budget emphasis menjadi acuan dalam menilai kinerja anggaran dengan tuntutan untuk mencapai target anggaran, oleh karena itu apabila bawahan dapat mencapai target yang ditentukan maka memperoleh *reward* dan kompensasi dari atasan. Ketika kinerja bawahan dapat melebihi dari target yang ditentukan maka akan memperoleh *reward* dan sebaliknya, ketika bawahan gagal mencapai

anggaran yang diharapkan maka akan menerima sanksi dari atasannya. Sehingga menyebabkan bawahan cenderung tidak membatasi anggaran dalam upaya menyederhanakan pencapaian anggaran "*budgetary slack*".

Kemungkinan *budgetary slack* akan meningkat jika penyusunan anggaran melibatkan manajer atau jika anggaran berfungsi sebagai stau-satunya alat untuk menilai kinerja karyawan atau manajer. Selain itu, mempunyai informasi yang berbeda. Tingkat kinerja yang dilaporkan dan yang diharapkan harus sesuai dengan tujuan perencanaan. Jika bawahan memiliki informasi yang lebih unggul daripada atasannya, mereka dapat memanfaatkan partisipasi penganggaran untuk keuntungan mereka dengan memberikan informasi yang berupa menggunakan data pribadi mereka. Hal ini dapat memudahkan pencapaian anggaran dan menyebabkan *budgetary slack* (dengan pelaporan anggaran yang tidak sesuai kinerja yang diharapkan).

Keutamaan atas program dan kegiatan yang telah selesai atau akan selesai sehubungan dengan pelaksanaan anggaran yang dapat diukur dan kualitasnya memuaskan merupakan tujuan dari penganggaran berbasis kinerja. Olehnya, pelaksanaan program dan kegiatan yang menggunakan dana yang dianggarkan harus terukur dengan jelas indikator kerjanya yang disajikan dalam evaluasi kinerja dan target yang diharapkan.

Atasan dan bawahan terlibat dalam penyusunan anggaran dengan adanya perbedaan tujuan antara atasan dan bawahan akan membuat timbulnya permasalahan internal. Dalam hal ini anggaran digunakan sebagai alat penekanan kepada bawahannya. Penyusunan Anggaran Pemerintah Kabupaten Majene tahun

2020 telah rampung dan diselesaikan pada bulan desember 2019 dan disetujui dalam rapat Paripurna di kantor DPRD Kabupaten Majene. Rapat tersebut mengenai jumlah APBD Kabupaten Majene yang dikutip dalam <https://majenekab.go.id> adalah sebesar Rp. 1.858.576.460.959. akan tetapi dalam penyusunan APBD mengalami defisit sebesar Rp. 13.171.636.829.

APBD tahun 2019 sebesar Rp. 1.978.310.538.203 dan juga mengalami defisit yang mana jumlah anggaran pendapatan Kabupaten Majene sebesar Rp. 982.156.399.043,60 sedang anggaran belanja sebesar Rp. 996.154.138.160,33, total defisit sebesar Rp. 13.997.739.117 dan anggaran tahun 2018 sebesar Rp. 1.788.017.728.767 dan total defisitnya sebesar Rp. 30.851.027.87. Ini menunjukkan bahwa di tahun 2018 hingga 2019 APBD Kabupaten Majene mengalami peningkatan anggaran, tetapi pada tahun 2020 APBD Kabupaten Majene mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Adapun jumlah defisit yang besar terjadi pada tahun 2018 dibandingkan dengan tahun 2019 dan 2020. Hal ini bersamaan dengan adanya rekomendasi dari BPK terkait lima permasalahan pengelolaan keuangan Pemerintah Kabupaten Majene.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Majene pun telah 5 kali berturut-turut mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian. Namun di tahun 2018 BPK masih menemukan beberapa permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian, diantaranya: pengelolaan kas daerah dan kas bendahara pengeluaran yang belum memadai, pengelolaan dana kapitasi JKN pada 11 puskesmas yang juga belum memadai, pengelolaan pada retribusi kesehatan tidak sesuai ketentuan,

realisasi belanja jasa konsultasi sebesar Rp. 569.000.000 tidak didukung bukti yang sah, dan kelebihan pembayaran biaya modal senilai Rp. 269.030.000.

Defisit adalah selisih antara Anggaran Pendapatan dan Belanja yang nilainya negatif, atau jumlah Belanja daerah sangat tinggi dan mengurangi Pendapatan.

Adapun Laporan Realisasi APBD Kabupaten Majene tahun 2016 s/d 2020

Tabel 1.1 Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Kab. Majene 2016-2020

Laporan Realisasi Belanja Tahun 2016 sampai dengan 2020 sebelum perubahan				
Tahun	Uraian	Pendapatan dan Belanja	Realisasi	Selisih
2016	Pendapatan	Rp 868.165.324.265	Rp 800.830.284.780	Rp 67.335.039.485
	Belanja	Rp 868.365.324.266	Rp 800.659.899.520	Rp 67.705.424.746
2017	Pendapatan	Rp 865.690.214.790	Rp 918.545.076.655	Rp 52.854.861.865
	Belanja	Rp 864.390.214.790	Rp 888.136.212.304	Rp 23.745.997.514
2018	Pendapatan	Rp 871.847.775.174	Rp 872.674.394.613	Rp 826.619.439
	Belanja	Rp 870.547.775.174	Rp 887.677.794.369	Rp 17.130.019.195
2019	Pendapatan	Rp 971.557.408.491	Rp 974.783.672.815	Rp 3.226.264.324
	Belanja	Rp 969.757.408.491	Rp 976.805.107.702	Rp 7.047.699.211
2020	Pendapatan	Rp 989.112.233.332	Rp 904.331.316.218	Rp 84.780.917.114
	Belanja	Rp 990.112.233.322	Rp 828.567.983.103	Rp 161.544.250.219

Sumber: <http://www.djpk.kemenkeu.go.id/>

Berdasarkan tabel diatas bahwa Kabupaten Majene sejak tahun 2016 sampai dengan 2019 ini tidak mengalami defisit namun target anggaran tahun 2016 yang sudah ditetapkan tidak bisa dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Majene. Selanjutnya pada tahun 2017 hingga 2020 Pemerintah Kabupaten Majene bisa memenuhi target pendapatan dimana jumlah realisasi pendapatan lebih tinggi dari jumlah yang dianggarkan, tetapi pada tahun 2017 hingga 2019 jumlah realisasi belanja lebih besar dari pada target yang dianggarkan. Sedang untuk tahun anggaran 2020 ada indikasi terjadi kesenjangan anggaran dimana jumlah target pendapatan lebih rendah dari pada jumlah target belanja.

Untuk itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan judul **“Pengaruh *Budget Emphasis* dan *Information Asymetry* Terhadap *Budgetary Slack* Pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majene.”**

1.2 Rumusan Masalah

Yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaruh *Budget Emphasis* terhadap *Budgetary Slack* pada OPD Kabupaten Majene?
2. Bagaimana pengaruh *Information Asymetry* terhadap *Budgetary Slack* pada OPD Kabupaten Majene?
3. Bagaimana pengaruh *Budget Emphasis* dan *Information Asymetry* terhadap *Budgetary Slack* pada OPD Kabupaten Majene?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji dan mengetahui pengaruh *Budget Emphasis* terhadap *Budgetary Slack* pada OPD Kabupaten Majene.
2. Untuk menguji dan mengetahui pengaruh *Information Asymetry* terhadap *Budgetary Slack* pada OPD Kabupaten Majene.
3. Untuk menguji dan mengetahui pengaruh *Budget Emphasis* dan *Information Asymetry* terhadap *Budgetary Slack* pada OPD Kabupaten Majene.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini adalah:

4.3.1 Manfaat Teoritis

Bagi peneliti yang diharapkan dapat menambah wawasan bagi siapapun yang membaca penelitian ini yang mana mengenai bagaimana pengaruh Budget Emphasis dan *Information Asymetry* terhadap *Budgetary Slack* pada OPD Kabupaten Majene.

4.3.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Pemerintah Kabupaten Majene

Menjadi pertimbangan terkait bagaimana Budget Emphasis dan *Information Asymetry* yang memungkinkan untuk terjadinya *Budgetary Slack* pada OPD Kabupaten Majene.

b. Bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian ini pun dapat menambah wawasan dan pengetahuan masyarakat terhadap Pemerintah Kabupaten Majene terkait bagaimana *Budget Emphasis* dan *Information Asymetry* yang memungkinkan untuk terjadinya *Budgetary Slack* pada OPD Kabupaten Majene.

c. Bagi Mahasiswa

Dari hasil penelitian ini bisa dijadikan bahan referensi untuk mahasiswa dan menjadi bahan evaluasi bagi mahasiswa yang meneliti dengan penelitian serupa.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Anggaran Sektor Publik

1. Pengertian Anggaran

Anggaran harus dapat menyajikan informasi yang jelas mengenai tujuan, sasaran, hasil, dan manfaat yang diperoleh dari suatu kegiatan. Karena pada dasarnya anggaran (*budget*) merupakan suatu rencana kerja yang dinyatakan secara kuantitatif dari aktivitas usaha sebuah organisasi. Untuk itu anggaran perlu mengidentifikasi sumber daya dan komitmen yang dibutuhkan untuk memenuhi tujuan organisasi selama periode yang dianggarkan (Herlianto, 2011).

Anggaran adalah hasil dari suatu perencanaan yang berupa daftar mengenai bermacam-macam kegiatan terpadu, baik menyangkut penerimaannya maupun pengeluarannya yang dinyatakan dalam satuan uang dalam jangka waktu tertentu (Hasanah, 2017).

Menurut Anthony (2011) anggaran merupakan sebuah rencana keuangan, biasanya mencakup periode satu tahun dan merupakan alat-alat untuk perencanaan jangka pendek dan pengendalian dalam organisasi. Sedangkan menurut Mardiasmo (2018) anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial.

Berdasarkan pengertian anggaran diatas, dapat disimpulkan bahwa anggaran merupakan sebuah rencana baik rencana kerja ataupun rencana keuangan yang dinyatakan secara kuantitatif dan diukur secara finansial serta hendak dicapai selama periode tertentu.

2. Pengertian Anggaran Sektor Publik

Anggaran sektor publik adalah perencanaan finansial tentang perkiraan pengeluaran dan penerimaan yang diharapkan akan terjadi dimasa mendatang dengan melihat data yang diperoleh dari masa lalu sebagai acuan penetapan anggaran. Anggaran sektor publik harus dapat memenuhi kriteria, antara lain: merefleksikan perubahan prioritas kebutuhan dan keinginan masyarakat serta menentukan penerimaan dan pengeluaran departemen-departemen pemerintah atau pemerintah daerah (Biduri, 2018).

Anggaran publik merupakan suatu dokumen yang menggambarkan kondisi keuangan dari suatu organisasi yang meliputi informasi mengenai pendapatan, belanja dan aktivitas. Anggaran berisi estimasi mengenai apa yang dilakukan organisasi di masa yang akan datang (Mardiasmo, 2018).

Jadi dapat disimpulkan bahwa anggaran sektor publik merupakan perencanaan finansial tentang pengeluaran dan penerimaan dari suatu organisasi yang meliputi informasi mengenai pendapatan, belanja dan aktivitas untuk masa mendatang.

3. Fungsi Anggaran Sektor Publik

Bagi organisasi sektor publik seperti pemerintah, anggaran tidak hanya sebuah rencana tahunan tetapi juga merupakan bentuk akuntabilitas atas

pengelolaan dana publik yang dibebankan kepadanya (Majid, 2019). Mardiasmo (2018) menguraikan anggaran sektor publik mempunyai beberapa fungsi utama, yaitu:

- a. Anggaran sebagai alat perencanaan (*Planning Tool*), anggaran merupakan alat perencanaan manajemen untuk mencapai tujuan organisasi.
- b. Anggaran sebagai alat pengendalian (*Control Tool*), anggaran digunakan untuk menghindari adanya *overspending*, *underspending*, dan salah sasaran (*misappropriation*) dalam pengalokasian anggaran pada bidang lain yang bukan merupakan prioritas.
- c. Anggaran sebagai alat kebijakan fiskal (*Fiscal Tool*), digunakan untuk menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
- d. Anggaran sebagai alat politik (*political Tool*), anggaran merupakan dokumen politik sebagai bentuk komitmen eksekutif dan kesepakatan legislatif atas penggunaan dana publik untuk kepentingan tertentu.
- e. Anggaran sebagai alat koordinasi dan komunikasi (*Coordination and Communication*), anggaran publik merupakan alat koordinasi antar bagian dalam pemerintahan.
- f. Anggaran sebagai alat penilaian kinerja (*Performance Measurement Tool*), anggaran merupakan wujud komitmen dari *budget holder* (eksekutif) kepada pemberi wewenang (legislatif). Kinerja eksekutif akan dinilai berdasarkan pencapaian target anggaran dan efisiensi pelaksanaan anggaran.

- g. Anggaran sebagai alat motivasi (*Motivation Tool*), anggaran dapat digunakan sebagai alat untuk memotivasi manajer dan stafnya agar bekerja secara ekonomis, efektif, dan efisien dalam mencapai target dan tujuan organisasi yang telah ditetapkan.
- h. Anggaran sebagai alat untuk menciptakan ruang publik (*Publik Sphere*), anggaran publik tidak boleh diabaikan oleh kabinet, birokrat dan DPR/DPRD. Masyarakat, LSM, Perguruan Tinggi, dan berbagai organisasi kemasyarakatan harus terlibat dalam proses penganggaran publik.

4. Prinsip-Prinsip Anggaran Sektor Publik

Mardiasmo (2018) menguraikan prinsip-prinsip anggaran sektor publik sebagai berikut:

- a. Otorisasi oleh legislatif, anggaran publik harus mendapatkan otorisasi dari legislatif terlebih dahulu sebelum eksekutif dapat membelanjakan anggaran tersebut.
- b. Komprehensif, anggaran harus menunjukkan semua penerimaan dan pengeluaran pemerintah.
- c. Keuntungan anggaran, semua penerimaan dan belanja pemerintah harus terhimpun dalam dana umum (*general fund*).
- d. *Nondiscretionary appropriation*, jumlah yang disetujui oleh dewan legislatif harus termanfaatkan secara ekonomis, efisien, dan efektif.
- e. Periodik, anggaran merupakan suatu proses periodik, dapat bersifat tahunan maupun multi-tahunan.

- f. Akurat, estimasi anggaran hendaknya tidak memasukkan cadangan yang tersembunyi yang dapat dijadikan sebagai kantong-kantong pemborosan dan inefisiensi anggaran serta dapat mengakibatkan munculnya *underestimate* pendapatan dan *overestimate* pengeluaran.
- g. Jelas, anggaran hendaknya sederhana, dapat dipahami masyarakat, dan tidak membingungkan.
- h. Diketahui publik, anggaran harus diinformasikan kepada masyarakat luas.

5. Siklus Anggaran

Prinsip-prinsip pokok siklus anggaran perlu diketahui dan dikuasai dengan baik oleh penyelenggara pemerintahan. Siklus anggaran menurut Mardiasmo (2018) meliputi empat tahap yang terdiri atas:

a. Tahap Persiapan Anggaran (*Budget Preparation*)

Pada tahap persiapan anggaran dilakukan taksiran pengeluaran atas dasar taksiran pendapatan yang tersedia. Terkait masalah tersebut, yang perlu diperhatikan adalah sebelum menyetujui taksiran pengeluaran, hendaknya terlebih dilakukan penaksiran pendapatan secara lebih akurat.

b. Tahap Ratifikasi Anggaran

Tahap ini merupakan tahap yang melibatkan proses politik yang cukup rumit dan cukup berat. Pimpinan eksekutif dituntut tidak hanya memiliki “*managerial skill*” namun juga harus mempunyai kemampuan antara lain “*political skill*” dan “*coalition building*” yang memadai.

c. Tahap Pelaksanaan Anggaran (*Budget Implementation*)

Dalam tahap pelaksanaan anggaran, hal terpenting yang harus diperhatikan oleh manajer keuangan publik adalah dimilikinya sistem (informasi) akuntansi dan sistem pengendalian manajemen.

d. Tahap Pelaporan dan Evaluasi anggaran

Tahap persiapan, ratifikasi, dan implementasi anggaran terkait dengan aspek operasional anggaran, sedangkan tahap pelaporan dan evaluasi terkait dengan aspek akuntabilitas.

2.1.2 *Budgetary Slack* (Kesenjangan Anggaran)

Budgetary Slack/senjangan anggaran yaitu perbedaan antara total anggaran dan estimasi terbaik. *Budgetary Slack* umumnya dilakukan dengan menaikkan biaya atau menurunkan pendapatan dari yang seharusnya. Perilaku yang positif biasa berupa peningkatan kinerja atasan karena termotivasi oleh anggaran yang dipakai sebagai dasar penilaian kinerja mereka. Perilaku negatif yang mungkin timbul adalah kecenderungan manajer untuk menciptakan *Slack* dalam anggaran (Triana. 2012).

Menurut Lubis (2017) mendefinisikan *Budgetary Slack* sebagai selisih antara sumber daya yang sebenarnya diperlukan secara efisien dan jumlah sumber daya yang lebih besar untuk menyelesaikan suatu tugas tersebut. Bawahan melakukan ini untuk memberikan *margin of safety* agar memenuhi tujuan yang telah di anggarkan.

Kesenjangan yang seperti ini biasanya dilakukan oleh manajer bawahan dikarenakan mereka mengetahui bahwa pengukuran kinerja mereka dilihat dari bagaimana keberhasilan anggaran yang telah dibuat Bersama. Ketika terjadi

Budgetary Slack, agen akan lebih condong menyerahkan anggaran dengan pendapatan yang direndahkan dan juga biaya dinaikkan, dengan demikian sasaran lebih mudah untuk dicapai. Pendapat dari bawahan harus dievaluasi dengan berhati-hati dikarenakan adanya tendensi untuk menyertakan kepentingan pribadinya atau divisi di dalam perancangan anggaran (Sawitri, 2014).

Budgetary Slack merupakan upaya seorang pembuat anggaran untuk membuat target anggaran yang lebih mudah dicapai padahal kapasitas sesungguhnya masih jauh lebih tinggi, dengan menganggarkan pendapatan yang lebih rendah dan biaya yang lebih tinggi dari estimasi mereka mengenai jumlah-jumlah tersebut (Kusniawati, 2017). Terdapat beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur variabel dependen yang dikembangkan oleh Alfebriano (2013), yaitu:

1. Standar anggaran dapat meningkatkan pencapaian target anggaran.
2. Target anggaran mudah dicapai.
3. Memonitor biaya disebabkan adanya batasan penggunaan anggaran.
4. Tuntutan pada anggaran.
5. Target anggaran membuat tidak efisien.
6. Target anggaran sulit dicapai.

Ada beberapa alasan terjadinya senjangan anggaran, yaitu:

1. *Budgetary Slack* akan membuat kinerja seolah terlihat lebih baik di mata atasan jika mereka bisa mencapai sesuai tujuan anggaran.
2. *Budgetary Slack* sering digunakan untuk mengatasi ketidakpastian memprediksi masa yang akan datang.

3. Pengalokasian sumber daya akan dilaksanakan berdasarkan proyeksi anggaran biaya, sehingga senjangan membuat fleksibel. (Rukmana, 2013).

Perancangan senjangan anggaran bisa dimulai dari pendekatan *agency theory*. Praktik senjangan anggaran dalam perspektif *agency theory* dipengaruhi dengan adanya konflik/pertentangan kepentingan antara agen (manajemen) dengan *principal* yang timbul bila setiap pihak berupaya untuk mencapai dan mempertahankan tingkat kemakmuran yang dikehendakinya. *Agency theory* merupakan konsep yang menjelaskan hubungan kontraktual antara *principal* dan *agents* (Rukmana, 2013).

Kesenjangan anggaran ini menimbulkan dampak negatif dalam pengelolaan keuangan suatu entitas atau organisasi. Menurut Merchant (2014), terjadinya *Budgetary Slack* berdampak tidak baik karena dapat mengaburkan kinerja yang sesungguhnya sehingga mengubah keputusan berdasarkan informasi yang tidak akurat. Selain itu, *Budgetary Slack* juga dapat menimbulkan adanya sumber daya yang menganggur dan tidak terpakai (Yudianto, 2018).

2.1.3 Budget Emphasis (Penekanan Anggaran)

Menurut Afriyanti (2016) *Budget Emphasis* merupakan desakan dari atasan pada bawahan untuk menjalankan anggaran yang telah dibuat dengan baik, ketika suatu organisasi menggunakan anggaran sebagai tolak ukur kinerja, maka bawahan akan berupaya menaikkan kinerjanya dengan dua cara yaitu yang pertama, meningkatkan *performance*, sehingga realisasi anggarannya lebih beda dari pada yang dianggarkan. Sedang cara yang kedua adalah dengan cara membuat anggaran mudah untuk dicapai dengan merendahkan pendapatan dan

meninggikan biaya sehingga anggaran tersebut mudah untuk dicapai, dalam hal ini akan menimbulkan *Budgetary Slack*.

Menurut Sutanaya (2018) *Budget Emphasis* yaitu organisasi menjadikan anggaran menjadi salah satu faktor yang paling dominan dalam pengukuran kinerja bawahan. Bilamana dalam organisasi terdapat keadaan, yaitu anggaran merupakan satu faktor yang paling dominan dalam mengukur kinerja bawahan, inilah yang dinamakan penekanan anggaran. Bila kinerja bawahan sangat ditentukan oleh anggaran yang telah disusun, maka bawahan akan berusaha memperoleh *variance* yang menguntungkan. *Variance* yang menguntungkan ini diperoleh dengan cara menciptakan *Slack*. Cara mengatasi tekanan berupa material misalnya dengan memberikan kesesuaian kompensasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, kesesuaian kompensasi berimplikasi mengurangi kecurangan (Arthana, 2019).

Budget Emphasis dalam pemerintah daerah merupakan salah satu faktor yang dapat memungkinkan untuk memicu terjadinya kesenjangan anggaran. Apabila beban daerah terlalu tinggi sedangkan pendapatannya hanya biasa-biasa saja maka kemungkinan terjadinya kesenjangan menjadi sangat tinggi. Hal seperti inilah yang mendorong bawahan untuk meningkatkan kinerjanya dengan melakukan kesenjangan anggaran karena penilaian kinerja bawahan sangat ditentukan oleh anggaran yang telah disusun. Dengan tujuan agar anggaran yang ditetapkan mudah dicapai, sehingga bawahan akan memperoleh penghargaan jika kinerja bawahan ditandai dengan pencapaian anggaran (Nopriyanti, 2016).

Salah satu bentuk dari *Budget Emphasis* adalah bonus yang diberikan kepada bawahan ketika target anggaran tercapai. Dengan kompensasi tersebut memungkinkan timbulnya *Budgetary Slack*, dimana bawahan menciptakan anggaran yang mudah dicapai untuk mendapatkan bonus ketika target anggaran tercapai. Dampak kompensasi atas target anggaran, yaitu: seringkali bonus didasarkan pada pencapaian dan kelebihan anggaran merupakan elemen penting dari kompensasi manajemen (Tenriwaru, 2015).

Pada umumnya, bonus tidak dibayarkan kecuali jika anggaran terpenuhi. Seringkali bonus meningkat jika target anggaran terpenuhi, namun bonus tersebut umumnya dibatasi pada tingkatan tertentu. Karena adanya alasan yang jelas tersebut, para manajer yang memiliki program bonus seperti itu atau yang kinerjanya dievaluasi berdasarkan upaya pencapaian target yang sangat mungkin dicapai ketimbang anggaran yang longgar. Dan akhirnya, anggaran yang sangat mungkin dicapai biasa mengakibatkan perilaku yang kurang disukai pada akhir periode anggaran yang dilakukan oleh manajer yang bermaksud untuk mendapatkan bonus mereka (Tenriwaru, 2015).

Pengukuran keefektifan kinerja manajerial diperlukan untuk menilai prestasi dari organisasi yang dipimpinnya. Pengukuran kinerja pada instansi pemerintah daerah harus mendapat perhatian karena berkaitan dengan tanggung jawab alokasi anggaran daerah (Triseptya, 2017). olehnya kinerja instansi pemerintah diukur berdasarkan seberapa besar hasil yang dicapai terhadap anggaran yang telah ditetapkan pada masing-masing instansi, sehingga atasan akan mendesak bawahan untuk melaksanakan anggaran yang telah ditetapkan agar

kinerja manajerial terlihat baik (wiyastuti, 2021). Pengukuran kinerja berdasarkan anggaran yang telah disusun membuat bawahan akan berusaha mendapatkan *variance* yang menguntungkan dengan menciptakan *Slack*, antara lain dengan merendahkan penghasilan dan meninggikan biaya saat penyusunan anggaran (Irfan, 2016). Penelitian terdahulu menjelaskan *Budget Emphasis* menjadi *management control* untuk memenuhi tercapainya target anggaran yang dapat menyebabkan *Slack* anggaran (Fadhli, 2019).

Indikator *Budget Emphasis* menurut Triana Maya (2012) diukur dengan 6 indikator yaitu:

1. Besarnya pendapatan yang diperoleh
2. Kemampuan dan kesungguhan dalam memperhatikan kualitas terhadap usaha yang dicurahkan untuk pekerjaan.
3. Kemampuan dalam mencapai target anggaran.
4. Kemampuan menjalin hubungan yang baik dengan atasan/bawahan.
5. Efisiensi dalam menyikapi pekerjaan dan menjalankan operasi unit.
6. Kemampuan dalam bersosialisasi dengan kelompok staf.

2.1.4 Information Asymetry (Asimetri Informasi)

Menurut Anthony (2012) *Information Asymetry* merupakan suatu kondisi jikalau atasan atau *principal* tidak memiliki informasi yang memadai tentang kinerja bawahan atau agen bak didalam kinerja sebenarnya, dorongan serta tujuan, dengan demikian atasan tidak bisa menetapkan sumbangan bawahan terhadap hasil sebenarnya entitas.

Putranto (2012) mengatakan *Information Asymetry* adalah suatu keadaan dimana salah satu pihak mempunyai informasi yang lebih, baik atasan maupun bawahan. Bila atasan memiliki informasi yang lebih banyak maka akan muncul tuntutan yang lebih besar dari atasan kepada bawahan mengenai pencapaian target anggaran yang menurut bawahan anggaran tersebut terlalu tinggi. Bila bawahan memiliki informasi yang lebih banyak maka bawahan akan menyatakan target lebih rendah daripada yang dimungkinkan untuk dicapai.

Information Asymetry yang dimiliki antara manajer tingkat bawah atau menengah dengan manajemen di atasnya dalam penyusunan anggaran (Jaya, 2013). Adanya *Information Asymetry* merupakan salah satu faktor yang memicu timbulnya *Budgetary Slack*. Hal ini bisa terjadi ketika seorang bawahan cenderung memberikan informasi yang bias dari informasi pribadi mereka, yaitu dengan cara membuat anggaran yang relatif lebih mudah dicapai, sehingga terjadilah *Budgetary Slack*. (Kusniawati, 2017).

Kesenjangan anggaran akan menjadi lebih besar dalam kondisi *Information Asymetry* karena *Information Asymetry* mendorong bawahan/pelaksana anggaran membuat senjangan anggaran. Adanya *Information Asymetry* akan mendorong bawahan untuk menyajikan informasi yang tidak akurat dan mengesampingkan keadaan aktual yang sebenarnya terutama jika informasi tersebut berkaitan dengan pengukuran kinerja dimana bawahan bisa secara fleksibel untuk melakukan manajemen laba (Yusra, 2016).

Menurut Lubis (2017) timbulnya *Information Asymetry* terjadi karena agen lebih memahami informasi lebih yang menyebabkan atasan tidak mampu untuk

menentukan apakah bawahan melakukan pekerjaan dengan benar secara optimal. *Information Asymetry* dianggap sebagai faktor timbulnya *Budgetary Slack* dikarenakan adanya pemanfaatan informasi untuk menciptakan kelonggaran anggaran (Fanani, 2019). *Information Asymetry* digunakan oleh bawahan untuk menyembunyikan informasi mengenai kinerjanya, yang mengakibatkan kurangnya motivasi untuk meningkatkan hasil karena ketidakmampuannya ditutupi oleh *Information Asymetry* dengan memberikan informasi yang bias (Faria, 2013).

Penelitian Alfebriano (2013), Kusniawati (2017) Sawitri (2014), Apriadinata (2014), menunjukkan bahwa *Information Asymetry* berpengaruh positif terhadap senjangan anggaran. *Information Asymetry* yang tinggi akan memicu meningkatnya senjangan anggaran yang tinggi juga sebaliknya jika *Information Asymetry* yang dimiliki rendah maka memperkecil senjangan anggaran (Hikmawati, 2018).

Information Asymetry dapat diukur dengan beberapa indikator menurut Kire (2019) yaitu:

1. Informasi yang dimiliki bawahan lebih dibandingkan atasan
2. Hubungan input-output yang ada dalam operasi internal
3. Kinerja potensial
4. Teknis pekerjaan
5. Mampu menilai dampak potensial
6. Pencapaian bidang kegiatan

2.2 Hasil Penelitian Terdahulu/Tinjauan Empirik

Di bawah ini merupakan beberapa penelitian terdahulu yang dilakukan oleh beberapa orang yang berkaitan dengan Pengaruh *Budget Emphasis* dan *Information Asymetry* Terhadap *Budgetary Slack* Pada Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Majene, yaitu:

Tabel 2.1 Tinjauan Empirik

No	Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Anggita Lupita Sari, Nur Diana dan M. cloud Mawardi (2019)	Pengaruh Partisipasi Anggaran, <i>Information Asymetry</i> , <i>Budget Emphasis</i> dan Komitmen Organisasi Terhadap <i>Budgeting Slack</i>	Dapat ditarik kesimpulan bahwa partisipasi anggaran, <i>Information Asymetry</i> , <i>Budget Emphasis</i> dan komitmen organisasi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap <i>budgeting Slack</i> . Variabel partisipasi anggaran, asimetri, <i>Budget Emphasis</i> dan komitmen organisasi secara Bersama-sama berpengaruh terhadap <i>budgeting Slack</i> . Secara parsial variabel partisipasi dan variabel <i>Budget Emphasis</i> berpengaruh secara positif signifikan terhadap variabel <i>budgeting Slack</i> . Sedangkan variabel <i>Information Asymetry</i> dan komitmen organisasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap variabel <i>budgeting Slack</i> .	Variabel X <i>Budget Emphasis</i> dan <i>Information Asymetry</i> . Teknik pengambilan sampel: <i>purposive sampling</i> Metode pengambilan data: menggunakan kuesioner Menggunakan metode analisis regresi linear berganda.	Terdapat empat variabel X sedang peneliti hanya memiliki dua variabel X Sampel yang diteliti peneliti terdahulu adalah koperasi sedang sampel peneliti adalah OPD.
2.	Elsa Meirina dan Afdalludin (2018)	Pengaruh Partisipasi Anggaran, <i>Information Asymetry</i> dan <i>Budget Emphasis</i> Terhadap <i>Slack Anggaran</i>	Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan bahwa pada Bappeda Sumatera Barat, terjadinya <i>Slack</i> anggaran dipengaruhi oleh <i>Information Asymetry</i> yang diperoleh si penyusun	Variabel X <i>Budget Emphasis</i> dan <i>Information Asymetry</i> . Teknik pengambilan sampel: <i>purposive sampling</i> Metode	Terdapat tiga variabel X sedang peneliti hanya memiliki dua variabel X

			anggaran. Sedangkan partisipasi anggaran dan <i>Budget Emphasis</i> tidak berpengaruh terjadinya <i>Slack</i> anggaran.	pengambilan data: menggunakan kuesioner Metode analisis: regresi linear berganda Sampel yang diteliti: OPD	
3.	Heny Kusniawati dan Ibnu Abni Lahaya (2017)	Pengaruh Partisipasi Anggaran, Penekanan Anggaran, <i>Information Asymetry</i> terhadap <i>Budgetary Slack</i> pada SKPD Kota Samarinda	Hasil pengujian hipotesis bahwa, partisipasi anggaran berpengaruh negatif namun tidak signifikan terhadap <i>Budgetary Slack</i> pada SKPD kota Samarinda, Budget Emphasis berpengaruh positif signifikan terhadap <i>Budgetary Slack</i> pada SKPD Samarinda dan <i>Information Asymetry</i> berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap <i>Budgetary Slack</i> pada SKPD Samarinda.	variabel X <i>Budget Emphasis</i> dan <i>Information Asymetry</i> . Teknik pengambilan sampel: <i>purposive sampling</i> Metode pengambilan data: menggunakan kuesioner Metode analisis: regresi linear berganda Sampel yang diteliti: OPD	Terdapat tiga variabel X sedang peneliti hanya memiliki dua variabel X
4.	Eka Fitriana dan Mispiyanti (2020)	Pengaruh Budget Emphasis, Self Esteem, dan Partisipasi Anggaran terhadap <i>Budgetary Slack</i> pada OPD Pemerintah Kabupaten Kebumen	Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa budget emphasis berpengaruh positif dan signifikan, self esteem berpengaruh positif dan signifikan, dan partisipasi anggaran tidak berpengaruh	Variabel X budget emphasis, populasi penelitian pada OPD pengambilan sampel: <i>purposive sampling</i> Metode pengambilan data: menggunakan kuesioner	Terdapat tiga variabel X sedang peneliti hanya memiliki dua variabel X
5.	Yuli Nurhayati, Dian Wulan Sari, dan Endar Pradesa (2022)	Pengaruh Partisipasi Anggaran, Tekanan Anggaran, Locus of Control, Asimetri Informasi dan Komitmen Organisasi terhadap Kesenjangan Anggaran pada perusahaan BUMN di Kota Lubuklinggau	Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi anggaran, locus of control dan komitmen organisasi berpengaruh negative terhadap kesenjangan anggaran, tekanan anggaran dan informasi asimetri berpengaruh positif terhadap kesenjangan anggaran.	Variabel X budget emphasis dan <i>Information asymetry</i> pengambilan data: menggunakan kuesioner Teknik analisis data: menggunakan spss	Memiliki 5 variabel X dan lokasi penelitian pada BUMN sedangkan peneliti pada OPD

2.3 Kerangka Konseptual

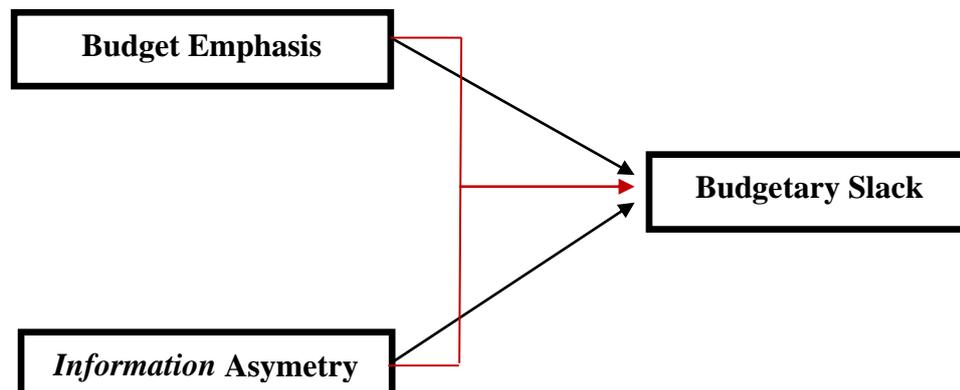
Dari gambar kerangka konseptual, menjelaskan bahwa calon peneliti akan meneliti variabel-variabel independen terhadap variabel dependen yang dijelaskan tentang pengaruh *Budget Emphasis* terhadap *Budgetary Slack* pada OPD Kabupaten Majene, pengaruh *Information Asymetry* terhadap *Budgetary Slack* pada OPD Kabupaten Majene dan pengaruh *Budget Emphasis* dan *Information Asymetry* terhadap *Budgetary Slack* pada OPD Kabupaten Majene.

Menurut Anggasta (2014), *Budget Emphasis* sebagai tolak ukur kinerja anggaran ditetapkan untuk menuntut kinerja agar mencapai target anggaran, sehingga ketika target anggaran yang ditetapkan tercapai maka akan membuat seorang bawahan mendapatkan *reward* dan kompensasi dari seorang atasan. Apabila kinerja seorang bawahan melampaui anggaran yang ditetapkan maka ia dapat menerima sebuah *reward* dan sebaliknya, jika seorang bawahan kinerjanya tidak dapat mencapai target anggaran maka bawahan bisa mendapatkan sanksi dari atasannya. Hal ini membuat seorang bawahan akan cenderung melonggarkan anggarannya dalam penyusunan anggaran sehingga anggaran mudah dicapai dengan kata lain melakukan *Slack* anggaran (Alfebriano, 2013).

Peluang terjadinya *Slack* anggaran akan semakin tinggi jika manajer diikutkan dalam proses penyusunan anggaran atau anggaran sebagai satu-satunya alat ukur kinerja manajer atau karyawan. Selain itu, ketidaksamaan memiliki informasi. Kondisi yang menyebabkan kesenjangan anggaran salah satunya adalah adanya *Information Asymetry*. Bagi tujuan perencanaan, anggaran yang telah dilaporkan sebaiknya sama dengan kinerja yang diharapkan. Bila bawahan

memiliki informasi lebih baik dari pada atasan, maka bawahan berkesempatan untuk mengambil dari partisipasi penganggaran dengan cara memberikan informasi yang efektif dari informasi pribadi mereka, sehingga anggaran tersebut mudah dicapai dan mengakibatkan terjadinya kesenjangan anggaran (yaitu dengan melaporkan anggaran dibawah kinerja yang diharapkan) (Sawitri, 2014).

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa *Budget Emphasis* dan *Information Asymetry* memiliki keterkaitan terhadap *Budgetary Slack* sehingga dalam konsep kerangka konseptual dalam penelitian ini terdiri dari tiga kotak yaitu dua kotak variabel independen (*Budget Emphasis* dan *Information Asymetry*) yang berurutan karena kedua variabel independen ini sama-sama menjadi faktor yang mempengaruhi *Budgetary Slack*. Dan terdapat dua jenis panah dari kotak variabel independen mengarah ke kotak variabel dependen, yaitu panah parsial dan panah simultan.



Gambar 2.1 Kerangka Konseptual

Keterangan:

————— : Pengaruh secara Parsial

————— : Pengaruh secara Simultan

2.4 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan kerangka konseptual tersebut, maka hipotesis yang dapat dirumuskan adalah:

H₁: *Budget Emphasis* berpengaruh signifikan terhadap *Budgetary Slack* pada OPD Kabupaten Majene.

H₂: *Information Asymetry* berpengaruh signifikan terhadap *Budgetary Slack* pada OPD Kabupaten Majene.

H₃: *Budget Emphasis* dan *Information Asymetry* bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap *Budgetary Slack* pada OPD Kabupaten Majene.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, merupakan jenis penelitian kuantitatif dimana melihat pengaruh antara *Budget Emphasis* (penekanan anggaran) dan *Information Asymetry* (Asimetri Informasi) terhadap *Budgetary Slack* (kesenjangan anggaran). menurut Siyoto (2015) metode penelitian kuantitatif merupakan salah satu jenis penelitian yang spesifikasinya adalah sistematis, terencana, dan terstruktur dengan jelas sejak awal hingga pembuatan desain penelitiannya. Definisi lain menyebutkan penelitian kuantitatif adalah penelitian yang banyak menuntut penggunaan angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data tersebut, serta penampilan dari hasilnya. Demikian pula pada tahap kesimpulan penelitian akan lebih baik bila disertai dengan gambar, tabel, grafik atau tampilan lainnya.

Menurut Sugiyono, metode penelitian kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Teknik pengambilan sampel pada umumnya dilakukan secara *random*, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2018). Metode ini disebut sebagai metode ilmiah (*scientific*) karena metode ini telah memenuhi kaidah-kaidah ilmiah yaitu konkrit, empiris, objektif, terukur, rasional dan sistematis. Metode ini juga disebut metode *discovery* karena dengan metode ini dapat ditemukan dan

dikembangkan berbagai iptek baru. Metode ini disebut kuantitatif karena data penelitian berupa angka-angka dan analisis menggunakan statistik (Sugiyono, 2018).

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

3.2.1 Lokasi

Penelitian yang akan dilakukan berada di Satuan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Majene, Provinsi Sulawesi Barat.

3.2.2 Waktu Penelitian

Tabel 3.1 Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	2021	2022		2023	
		Desember	Maret	April	Desem ber	April
1	Seminar Proposal					
2	Permintaan Izin Penelitian					
3	Pengumpulan Data					
4	Pengolahan Data					
5	Analisis dan Interpretasi					
6	Penyusunan Hasil Penelitian					

3.3 Jenis dan Sumber Data

3.3.1 Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif dan kualitatif. Data kuantitatif adalah data yang berbentuk angka atau bilangan. Sesuai dengan bentuknya, data kuantitatif dapat diolah atau dianalisis menggunakan teknik perhitungan matematika atau statistika (Siyoto, 2015). Adapun dalam penelitian ini data kuantitatif yang digunakan yaitu data yang berasal dari jawaban responden dalam kuesioner yang diisi. sedangkan data kualitatif adalah data yang

berbentuk kata, kalimat, gerak tubuh, ekspresi wajah, bagan, gambar dan foto (Sugiyono, 2018).

3.3.2 Sumber Data

1. Data Primer

Adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Data primer disebut juga sebagai data asli atau data baru yang memiliki sifat *up to date*. Untuk mendapatkan data primer, peneliti harus mengumpulkannya secara langsung. Teknik yang dapat digunakan peneliti untuk mengumpulkan data primer antara lain observasi, wawancara, diskusi terfokus dan penyebaran kuesioner (Siyoto, 2015).

2. Data Sekunder

Adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua). Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti Biro Pusat Statistik (BPS), buku, laporan, jurnal, dan lain-lain (Siyoto, 2015).

3.4 Populasi dan Sampel

3.4.1 Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2018). Olehnya, populasi dalam penelitian ini adalah pejabat struktural dengan jenjang jabatan Eselon III dan IV (Kepala bagian/kepala kantor/kepala sub bagian/sekretaris pada dinas dan badan daerah) yang berpartisipasi secara langsung dalam proses

penyusunan anggaran pada sekretariat daerah, sekretariat DPRD, Inspektorat, 21 Dinas dan 6 Badan dalam lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Majene.

Tabel 3.2: Daftar Jumlah Jabatan Struktural pada Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas dan Badan dalam Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Majene

No	Nama Instansi	Jenjang Jabatan		Total
		Eselon III	Eselon IV	
1	Sekretariat Daerah	11	33	44
2	Sekretariat DPRD	3	9	12
3	Inspektorat	4	2	6
4	Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga	5	14	19
5	Dinas Perumahan Permukiman dan Kebersihan (PERKIMBER)	6	11	17
6	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	5	11	16
7	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (BUDPAR)	5	15	20
8	Dinas Kesehatan (DINKES)	4	11	15
9	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)	4	11	15
10	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DUKCAPIL)	4	11	15
11	Dinas Sosial	6	15	21
12	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPKB)	4	11	15
13	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	4	11	15
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	4	11	15
15	Dinas Koperasi, UKM, Perdagangan dan Perindustrian (KOPDAGRIN)	4	11	15
16	Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOLPP)	5	12	17
17	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (NAKERTRANS)	4	9	13
18	Dinas Ketahanan Pangan	3	8	11
19	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA)	3	6	9
20	Dinas Perhubungan (DISHUB)	3	8	11
21	Dinas Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian (DISKOMINFO-SP)	3	8	11
22	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR)	6	13	19
23	Dinas Kelautan dan Perikanan	5	15	20
24	Dinas Pertanian Peternakan dan Perkebunan	6	15	21
25	Badan Perencanaan Daerah (BAPEDA)	5	15	20
26	Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD)	5	15	20
27	Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA)	5	15	20
28	Badan Kepegawaian dan Pemb. Sumber Daya Manusia (BKPSDM)	5	15	20
29	Badan Penelitian dan Pengembangan (LITBANG)	3	7	10
30	Badan Penanggulangan Bencana (BPBD)	7	11	18
	Total			500

Sumber: (<http://majenekab.go.id>)

3.4.2 Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut (Sugiyono, 2018). Dari total populasi pejabat eselon III dan IV di atas, diambil sampel menggunakan rumus *Slovin* dalam buku Noor (2017) sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + (N \times e^2)}$$

Dimana:

n = Jumlah elemen/anggota sampel.

N = Jumlah elemen/anggota populasi.

e = Error level (tingkat kesalahan) 10% atau 0,1

Jadi jika digunakan rumus di atas maka:

$$\begin{aligned} n &= \frac{500}{1 + (500 \times 0,1^2)} \\ &= 83 \end{aligned}$$

Jadi total sampel yaitu sebanyak 83 orang atau keseluruhan pejabat Eselon III dan IV. Adapun teknik pengambilan sampel pada penelitian ini adalah dengan prosedur *non probability sampling* dengan teknik *Purposive Sampling* yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2018).

3.5 Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner, menurut Sugiyono (2018) yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden. Dalam hal ini kuesioner dibuat menggunakan skala *likert* yang akan diisi oleh responden secara langsung.

Sugiyono (2018) mengemukakan skala *likert* digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dengan skala *likert*, maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan. Jawaban setiap instrumen yang menggunakan skala *likert* mempunyai gradasi dan sangat positif sampai sangat negatif. Untuk keperluan analisis kuantitatif, maka jawaban itu dapat diberi skor, yaitu:

Tabel 3.3 Skor Skala Likert

Keterangan	Bobot/Nilai
Sangat setuju/selalu/sangat positif	5
Setuju/sering/positif	4
Ragu-ragu/kadang-kadang/netral	3
Tidak setuju/hampir tidak pernah/negatif	2
Sangat tidak setuju/tidak pernah	1

Sumber: Sugiyono (2018: 136-137)

3.6 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel

3.6.1 Variabel Penelitian

pada dasarnya variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2018). Sehingga dalam penelitian ini, pengelompokan variabel-variabelnya terdiri dari dua variabel independen (bebas) dan satu variabel dependen (terikat). Jadi, variabel independen dalam penelitian ini adalah *Budget Emphasis* (X1) dan *Information Asymetry* (X2) sedang variabel dependen penelitian ini adalah *Budgetary Slack* (Y).

3.6.2 Definisi Operasional Variabel

Di bawah ini merupakan tabel variabel penelitian dan indikator yang digunakan untuk pembuatan kuesioner/angket dengan pengukuran variabel menggunakan skala *likert* pada setiap indikator variabel yaitu sebagai berikut:

Tabel 3.4 Definisi Operasional Variabel

Variabel	Definisi	Indikator	Nomor Kuesioner
<i>Budget Emphasis</i> (X1) Triana Maya (2012)	<i>Budget Emphasis</i> adalah desakan dari atasan kepada bawahan untuk menjalankan anggaran yang telah dibuat dengan baik sehingga atasan akan memberikan bonus apabila bawahan mencapai target dan memberikan sanksi kepada bawahan apabila tidak mencapai target.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Besarnya pendapatan yang diperoleh 2. Kemampuan dan kesungguhan dalam memperhatikan kualitas terhadap usaha yang dicurahkan untuk pekerjaan. 3. Kemampuan dalam mencapai target anggaran. 4. Kemampuan menjalin hubungan yang baik dengan atasan/bawahan. 5. Efisiensi dalam menyikapi pekerjaan dan menjalankan operasi unit. 6. Kemampuan dalam bersosi alisasi dengan kelompok staf. 	1-13
<i>Information Asymetry</i> (X2) Kire (2019)	<i>Information Asymetry</i> adalah ketidakseimbangan informasi antara atasan dan bawahan, dimana bawahan memiliki informasi lebih baik dibandingkan atasan sehingga bawahan memanfaatkan kesempatan dengan cara membuat anggaran yang relatif lebih mudah dicapai.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Informasi yang dimiliki bawahan lebih dibandingkan atasan 2. Hubungan input-output yang ada dalam operasi internal 3. Kinerja potensial 4. Teknis pekerjaan 5. Mampu menilai dampak potensial 6. Pencapaian bidang kegiatan. 	14-25
<i>Budgetary Slack</i> (Y) Alfebriano (2013)	<i>Budgetary Slack</i> adalah selisih antara total anggaran yang sebenarnya dibutuhkan dengan estimasi terbaik sehingga target mudah dicapai.	<ol style="list-style-type: none"> 6. Standar anggaran dapat meningkatkan pencapaian target anggaran. 7. Target anggaran mudah dicapai. 8. Memonitor biaya disebabkan adanya batasan penggunaan anggaran. 9. Tuntutan pada anggaran. 10. Target anggaran membuat tidak efisien. 11. Target anggaran sulit dicapai. 	26-37

3.7 Uji Instrumen

1. Uji Validitas

Menurut Sugiyono (2018) apabila terdapat kesamaan data yang terkumpul dengan data yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Untuk mencari validitas sebuah item, maka dapat mengkorelasikan skor item dengan total item

tersebut. Jika koefisiensi antara skor item dengan total item sama atau diatas 0,3 maka item tersebut dinyatakan valid, tetapi jika nilai korelasinya dinyatakan di bawah 0,3 maka dinyatakan nilai korelasinya tidak valid. Uji validitas akan menghasilkan apakah item yang kita gunakan sebagai instrumen penelitian akan valid dan mudah dipahami responden atau tidak.

2. Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur konsistensi hasil pengukuran dari kuesioner dalam penggunaan berulang. Uji reliabilitas dalam penelitian ini menggunakan *Cronbach Alpha* dengan kriteria pengambilan keputusan yang mana menurut Ghozali (2016) jika koefisien *Cronbach Alpha* $>0,7$ maka pertanyaan dinyatakan andal. Sebaliknya, jika koefisien *Cronbach Alpha* $= 0,7$ maka pertanyaan dinyatakan tidak handal. Uji Reliabilitas akan menghasilkan apakah kuesioner yang kita gunakan sebagai instrumen dapat dipercaya dan relatif konsisten atau tidak.

3.8 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik digunakan untuk mengetahui apakah ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik atau persamaan regresi berganda yang digunakan. Pengujian ini terdiri dari uji normalitas, multikolinieritas, dan heteroskedastisitas.

1. Uji Normalitas

Uji normalitas dilakukan sebelum data diolah berdasarkan model-model penelitian yang dilakukan. Uji normalitas data bertujuan untuk mendeteksi distribusi data dalam satu variabel yang akan digunakan dalam penelitian ini. Data yang baik dan layak untuk membuktikan model-model penelitian tersebut adalah

data distribusi normal. Uji normalitas yang digunakan adalah analisa P-P Plot dan Kolmogrof-Smirnof. Data dikatakan normal apabila nilai signifikan lebih besar 0,05 pada ($P > 0,05$). Sebaliknya apabila nilai signifikan lebih kecil dari 0,05 pada ($P < 0,05$) maka dikatakan tidak normal. Uji normalitas akan menghasilkan apakah data yang kita diperoleh terdistribusi normal atau tidak (Sugiyono, 2018).

2. Uji Multikolinearitas

Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antar-variabel independen. Jika terjadi korelasi, maka dinamakan terdapat *problem* Multikolinearitas (Multiko). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi diantara variabel independen. Pengujian ini dilakukan dengan mengukur besar korelasi antar-variabel independen: jika dua variabel independen terbukti berkorelasi secara kuat, maka dikatakan terdapat multikolinieritas pada kedua variabel tersebut (Santoso, 2019).

Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinearitas dapat dilihat dari besaran *Varians Inflation Factor* (VIP) dan *Tolerance*. Pedoman suatu model regresi yang bebas multikolinearitas adalah mempunyai angka *Tolerance* mendekati 1. Batas VIP adalah 10, jika nilai VIP di bawah 10, maka tidak terjadi gejala multikolinearitas (Gujarati, 2012).

3. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam sebuah model regresi, terjadi ketidaksamaan *varians* atau residual dari suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. Menurut Gujarati (2012) untuk menguji ada tidaknya heteroskedastisitas digunakan untuk uji-*rank spearman* yaitu dengan

mengkorelasi variabel independen terhadap nilai absolut dari residu (*error*). Hasil Uji Heteroskedastisitas akan menghasilkan apakah model regresi yang kita gunakan tidak terdapat ketidaksamaan *varians* atau residual dengan kata lain nilai duga lebih kecil dari nilai hasil penelitian yang sebenarnya.

3.9 Teknik Analisis Data

1. Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi berganda dilakukan bertujuan untuk meneliti apakah ada hubungan sebab akibat antara kedua variabel atau meneliti seberapa besar pengaruh *Budget Emphasis* dan *Information Asymetry* sebagai variabel independen terhadap variabel dependen yaitu *Budgetary Slack* pada OPD Kab. Majene. Rumus yang digunakan sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e$$

Keterangan:

Y : variabel dependen (*Budgetary Slack* pada OPD Kab. Majene)

a : bilangan konstanta

X1 : variabel independen (*Budget Emphasis*)

X2 : variabel independen (*Information Asymetry*)

b1, b2: koefisien regresi untuk masing-masing variabel independen

e : *error*

Sugiyono (2018)

Berdasarkan model regresi yang telah dibuat maka hasil dari model tersebut dianalisis dengan menggunakan analisis uji hipotesis penelitian (Uji-t). uji analisis regresi linear berganda akan menghasilkan hasil analisis yang pada akhirnya akan diuji dengan uji t, dan uji koefisien determinasi.

1. Uji Hipotesis

a. Uji t (Parsial)

Menurut Ghozali (2016) uji beda t-test digunakan untuk menguji seberapa jauh pengaruh variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini secara individu dalam menerangkan variabel dependen secara parsial.

Dasar pengambilan keputusan dalam uji-t yaitu:

- 1) Jika nilai probabilitas signifikan $> 0,05$ maka hipotesis ditolak. Jika hipotesis ditolak artinya independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.
- 2) Jika nilai probabilitas signifikan $< 0,05$ maka hipotesis diterima dan artinya bahwa variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Hasil dari Uji t akan menghasilkan apakah terdapat pengaruh secara sendiri-sendiri variabel *Budget Emphasis* terhadap *Budgetary Slack* pada OPD Kab. Majene dan pengaruh *Information Asymetry* terhadap *Budgetary Slack* pada OPD Kab. Majene.

b. Uji F (Simultan)

Uji statistik F pada dasarnya untuk menunjukkan apakah semua variabel independen mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Untuk menguji hipotesis ini digunakan statistik F dengan kriteria pengambilan keputusan menurut Ghozali (2016) sebagai berikut:

- 1) Jika nilai $F > 4$ maka H_1 ditolak pada derajat kepercayaan 5% dengan kata lain kita menerima hipotesis alternatif, yang menyatakan bahwa semua variabel independen secara serentak dan signifikan mempengaruhi variabel dependen.
- 2) Membandingkan nilai F hasil perhitungan dengan nilai F hasil tabel. Bila nilai F hitung lebih besar dari nilai F tabel maka H_0 ditolak dan menerima H_a .

Maka hasil uji F ini akan menghasilkan apakah variabel *Budget Emphasis* (X_1) dan *Information Asymetry* (X_2) berpengaruh secara bersama-sama terhadap *Budgetary Slack* pada OPD Kab. Majene (Y).

3. Koefisien Determinasi (R^2)

Ghozali (2016) mengemukakan bahwa koefisien determinasi (R^2) merupakan alat untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen.

Nilai koefisien determinasi antara 0 atau 1. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat terbatas dan sebaliknya jika nilai mendekati 1 berarti variabel-variabel independen hampir memberikan semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen. Hasil dari uji koefisien determinasi akan memperlihatkan seberapa besar sumbangsih variabel independen yaitu *Budget Emphasis* (X_1) dan *Information Asymetry* (X_2) terhadap *Budgetary Slack* pada OPD Kab. Majene (Y).

DAFTAR PUSTAKA

- Afriyanti, T. (2016). Pengaruh Partisipasi Anggaran, *Budget Emphasis*, Kompleksitas tugas dan Komitmen Organisasi Terhadap Slack Anggaran (Studi Kasus Pada SKPD Kota Semarang). *Ekonomi dan Bisnis*. Vol 1. No 17.
- Alfebriano. (2013). Faktor-faktor yang mempengaruhi *Slack Anggaran* Pada PT. BRI di Kota Jambi. *E-Jurnal Binar Akuntansi* Vol 2. No 1.
- Ambarini, E. F dan Mispriyanti. (2020). Pengaruh *Budget Emphasis*, *Self Estem* dan Partisipasi Anggaran Terhadap *Budgetary Slack* pada OPD Pemerintah Kabupaten Kebumen. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Manajemen, Bisnis dan Akuntansi* Vol. 2. No. 1.
- Anthony, Robert N dan Govindrajan. (2012). *Management Control System* Terjemahan Kurniawan Cakrawala dan Krista. Jakarta: Salemba Empat.
- Anggasta, Giovani E dan Henny Murtini. (2014). Determinan Senjangan Anggaran Dengan Asimetri Informasi Sebagai Pemoderasi (Studi Pada SKPD Kota Semarang). *Accounting Analysis Journal*. Vol 3. No 4.
- Apriadinata, M. D, Edy S dan Made P. A. P. (2014). “Pengaruh partisipasi Anggaran, Penekanan Anggaran, Komitmen Organisasi dan *Information Asymetry* terhadap *Slack Anggaran* dengan Kompleksitas tugas sebagai Variabel Moderasi (Studi Kasus Pada Bank Perkreditan Rakyat di kota Singaraja)”. *E-Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha*. Vol 2. No. 1.
- Arthana, I. K. (2019). Analisis Faktor-Faktor Terjadinya Kecurangan (*Fraud*) Dalam Pengelolaan Dana Desa Pada Kecamatan Amabi Oefeto Timur. *Jurnal. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Nusa Cendana*.
- Basyir, A. A. (2016). Pengaruh Partisipasi Anggaran, Informasi Asimetri dan Kapasitas Individu terhadap *Budgetary Slack* pada SKPD Pemerintah Kota Samarinda. *Jurnal Ekonomi dan Keuangan*. Vol. 13. No. 2.
- Biduri, S. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Sidoarjo, Jawa Timur: UMSIDA Press.
- Diansari, R. E dan Meilia S. (2020). Pengaruh Partisipasi Anggaran, Asimetri Informasi, Penekanan Anggaran, dan Ambiguitas Peran Terhadap *Budgetary Slack*. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen Akmenika*. Vol. 17 No. 2.

- Fadhli, A & Indriani, M. (2019). Pengaruh *Budget Emphasis*, Partisipasi Anggaran, Keterlibatan Pekerjaan dan *Locus of Control* Terhadap Senjangan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*. Vol 4. No 1.
- Fanani, Z dan Saudale, G. E. K. (2019). *Influence of Information Asymetry and Self-Efficacy in Budgetary Slack: An Experimental Study*. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*. Vol 20. No 2.
- Faria, J. A dan Silva S. M. G. (2013). *The Effects of Information asymetry on budget Slack: an experimental research*. *African journal of business management*. Vol 7. No 13.
- Ghozali. (2016). *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 23*. Semarang: BPFE Universitas Diponegoro.
- Gujarati, D. N. (2012). *Dasar-dasar Ekonometrika, Terjemahan Mangunsong Buku 2. (Edisi 5)*. Jakarta: R.C. salemba Empat.
- Hasanah, Nuramalia dan Achmad Fauzi. (2017). *Akuntansi Pemerintahan*. Bogor: IAI Media.
- Herlianto, D. (2011). *Teknik Penyusunan Anggaran Operasional Perusahaan*. Yogyakarta: Gosityng Publishing.
- Hikmawati, Novita W. R, Ade A dan Nurul M. (2018). Pengaruh partisipasi anggaran dan *Information Asymetry* terhadap senjangan anggaran dengan komitmen organisasi sebagai variabel moderasi (studi empiris Politeknik Negeri Banjarmasin). *Jurnal riset terapan akuntansi*. Vol. 2. No. 1
- Irfan, M, Budi S dan Lukman E. (2016). Pengaruh Partisipasi Anggaran Terhadap Senjangan Anggaran dengan *Information Asymetry*, Budget Emphasis dan Komitmen Organisasional sebagai Variabel Pemoderasi. Vol 17. No 2.
- Jaya, M. F. D dan Toto R. (2013). *The effects of Budget Participation, Asymetryc Information, Budget Emphasis and Organizational Commitment On Budgetary Slack* In Pemerintah Kota Pasuruan. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya*. Vol 1. No 2.
- Junika, C. Dini W. H dan Ardan G. A. (2019). Pengaruh Asimetri Informasi dan Partisipasi Anggaran terhadap Kesenjangan Anggaran (studi pada Satuan Kinerja Perangkat Daerah Kota Bandung Tahun 2019). *E-Proceeding of Management*. Vol. 6. No.2.
- Kire, T. I. M. B dan Ometan, H. M. (2019). Pengaruh partisipasi, Budget Emphasis dan *Information Asymetry* terhadap *Budgetary Slack* (studi

- kasus universitas nusa cendana). *Jurnal akuntansi: transparansi dan akuntabilitas*. Vol. 7. No. 2
- Kusniawati, H dan Lahaya, A. I. (2017). Pengaruh Partisipasi Anggaran, Penekanan Anggaran, *Information Asymetry* Terhadap *Budgetary Slack* Pada SKPD Kota Samarinda. *Journal* Vol. 13. No. 02.
- Lubis, A. I. (2017). *Akuntansi Keperilakuan*. (Edisi 3). Jakarta: Salemba Empat.
- Majid, J. (2019). *Akuntansi Sektor Publik*. Sulawesi Selatan: Pusaka Almaida.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. yogyakarta: ANDI.
- Meirina, E dan Afdalludin. (2018). Pengaruh Partisipasi Anggaran, *Information Asymetrys* dan *Budget Emphasis* terhadap *Slack* Anggaran. *Journal Pundi*. Vol. 02. No. 03.
- Merchant, Kenneth A dan Wim A. V. D. S. (2014). *Sistem Pengendalian Manajemen, Pengukuran Kinerja, Evaluasi dan Insentif*. Jakarta: Salemba Empat.
- Nopriyanti, E. (2016). Pengaruh Partisipasi Anggaran, Penekanan Anggaran, Komitmen Organisasi, *Locus of Control*, dan Kompleksitas Tugas Terhadap Kesenjangan Anggaran (Studi Empiris Pada SKPD Kabupaten Agama). *JOM Fekon* Vol. 3. No. 1.
- Noor, J. (2017). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: KENCANA.
- Nurhayati, Y, D. W, dan Pradesa E. (2022). Pengaruh Partisipasi Anggaran, Tekanan Anggaran, *Locus of Control*, Asimetri Informasi, dan Komitmen Organisasi Terhadap Kesenjangan Anggaran pada Perusahaan BUMN di Kota Lubuklinggau. *Ekombis Review Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, Vol. 10. No. 1.
- Putranto, Y. A. (2012). Pengaruh Moderasi *Information Asymetry* dan *Group Cohesiveness* Terhadap Hubungan Partisipasi Anggaran Dengan *Budgetary Slack*. *Jurnal Economia*. Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Musi Palembang.
- Raghunandan, M dan Narendra Ramgulan. (2012). *Examining the Behavipural Aspects of Budgeting with Particular Emphasis on Public Sector/Service Budget*. *International Journal of Business and Social Science*. Vol 3. No 14.
- Rukmana, P. (2013). Pengaruh Partisipasi Anggaran dan Asimetris Informasi Terhadap Timbulnya *Slack* (studi empiris pada pemerintah kota Padang). *jurnal Akuntansi*. Vol. 22.

- Sari, L. A, Nur D dan M. Cholid M. (2019). Pengaruh Partisipasi Anggaran, *Information Asymetry*, *Budget Emphasis* dan Komitmen Organisasi Terhadap *Budgeting Slack*. E-JRA. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Malang. Vol 08. No 03.
- Sawitri, E. S. (2014). Pengaruh partisipasi anggaran, Budget Emphasis dan *Information Asymetry* terhadap timbulnya kesenjangan anggaran. 2. 2.
- Santoso, S. (2019). Mahir Statistik Parametrik, Konsep Dasar dan Aplikasi Dengan SPSS. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Siyoto, S dan M. ali S. (2015). Dasar Metodologi Penelitian. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Sutanaya, I. M. dan Sari M. M. R. (2018). Pengaruh Partisipasi Anggaran, Penekanan Anggaran, dan Rencana Kompensasi Terhadap Senjangan Anggaran. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana. Vol. 22. 1.
- Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Triyani, D. (2016). Pengaruh Partisipasi Anggaran Terhadap Senjangan Anggaran dengan variabel *Information Asymetry*, ketidakpastian strategik dan gaya kepemimpinan sebagai variabel *moderating* (Studi Empiris Pada Rumah Sakit Swasta di Provinsi Riau). JOM Fekon Vol. 3. No. 1.
- Triana, M. (2012). Pengaruh partisipasi anggaran, *Budget Emphasis* dan *locus of control* terhadap *Slack* anggaran. Jurnal Binar Akuntansi. Vol 1. No 1.
- Triseptya G. N, Gagaring P dan Aini I. (2017). Pengaruh Partisipasi Anggaran, Komitmen Dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Manajerial Dengan Gaya Kepemimpinan Sebagai Moderasi. *Journal Of Management & Business* STIE Amkop Makassar. 1.1.
- Tenriwaru. (2015). Pengaruh Partisipasi Anggaran, *Information Asymetry*, dan Budget Emphasis Terhadap Kesenjangan anggaran Pemerintah Kabupaten Wajo. Vol. 5. No. 1.
- Wiyastuti, D. L. N, Indra P dan C. Sri H. (2021). Pengaruh Partisipasi Anggaran Dan Budget Emphasis Terhadap Senjangan Anggaran Dengan *Information Asymetry* Sebagai Variabel Intervening Pada Rumah Sakit Sumberlagah Mojokerto. Vol 4. No 2.
- Yasa, G. M, Putu G. D dan Made A. P. (2017). Pengaruh Partisipasi Anggaran, Penekanan Anggaran, Kejelasan Sasaran Anggaran, dan *Self Esteem* Terhadap Senjangan Anggaran Desa di Kecamatan Kubutambahan. E-

Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha Jurusan Akuntansi Program. Vol. 8. No. 2.

Yudanto. (2018). Kesenjangan Anggaran Pada Belanja Daerah Provinsi. Vol. 3. No. 3.

Yudea. (2017). Pengaruh Anggaran Partisipatif, Informasi Asimetri, Komitmen Organisasi dan Penekanan Anggaran terhadap Senjangan Anggaran (Studi PT Hexindo Adiperkasa, Tbk Balikpapan). Prosiding Seminar Nasional Manajemen dan Ekonomi Bisnis. Vol. 1.

Yusra, M. (2016). Akuntansi keperilakuan. Modul. Diakses 23 juni 2019. Dipublikasikan.

<https://majenekab.go.id>

<http://www.djpk.kemenkeu.go.id/>

<https://banniq.id/4-kali-wtp-bpk-sulbar-tetap-rekomendasi-5-permasalahan-pengelolaan-keuangan-ke-pemkab-majene/>